

## Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Berbasis Ekonomi Islam

Laiyinna Misqha Efendi, Mustika Ayu Anggreini, Rani Alfiani, Nurhayati Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[nurhayatiharahap.2710@gmail.com](mailto:nurhayatiharahap.2710@gmail.com)

**Abstract.** *One tactic to achieve the goals this country seeks is economic growth. Economic development performance is measured based on a number of factors, including population growth, per capita income, unemployment, poverty level and balance of payments. However, in reality, this progress has not provided the best results because the community is still not the main beneficiary. Ultimately, all parties must rethink appropriate development plans to implement in our country considering the increasing rates of unemployment and poverty that are currently occurring, so that neglected communities no longer exist. Experts in the fields of economics, society and politics are starting to study how to achieve effective development without being plagued by unemployment and poverty. The interesting aspect of these studies actually comes from Muslim economists and thinkers. They present new options along with the development of new theories about Islamic economics. Adherents of sharia economics which are based on Islamic sharia principles are expected to behave professionally and demonstrate neatness, honesty, orderliness and regularity in their processes. This article aims to investigate how an Islamic economic perspective on development can address the problems of poverty, unemployment and equality, starting with the arguments given above.*

**Keywords:** *Independence, Cooperation, Change, and Freedom*

**Abstrak.** Salah satu taktik untuk mencapai tujuan yang dicari negara ini adalah pertumbuhan ekonomi. Kinerja pembangunan ekonomi diukur berdasarkan sejumlah faktor, antara lain pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran. Namun kenyataannya, kemajuan tersebut belum memberikan hasil terbaik karena masyarakat masih belum menjadi penerima manfaat utama. Semua pihak pada akhirnya harus memikirkan kembali rencana pembangunan yang sesuai untuk diterapkan di negara kita mengingat meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang saat ini terjadi. Sehingga komunitas yang terabaikan tidak ada lagi. Para ahli di bidang ekonomi, masyarakat, dan politik mulai mempelajari bagaimana mencapai pembangunan yang efektif tanpa dirundung pengangguran dan kemiskinan. Aspek menarik dari penelitian-penelitian ini sebenarnya berasal dari para ekonom dan pemikir Muslim. Mereka menyajikan pilihan-pilihan baru seiring dengan berkembangnya teori-teori baru tentang ekonomi Islam. Penganut ekonomi syariah yang berpijak pada prinsip-prinsip syariah Islam diharapkan berperilaku profesional dan menunjukkan kerapian, kejujuran, ketertiban, dan keteraturan dalam prosesnya. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana sudut pandang ekonomi Islam terhadap pembangunan dapat mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesetaraan, dimulai dengan argumen yang diberikan di atas.

**Kata kunci:** Kemandirian, Kerja Sama, Perubahan, dan Kebebasan

### PENDAHULUAN

Pemerintah dan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa kemungkinan untuk meningkatkan pertumbuhan yang dilakukan oleh orde baru sepanjang era reformasi ini. Namun pada kenyataannya, hal tersebut belum memberikan hasil terbaik karena masyarakat masih belum mendukungnya. Mengingat meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan saat ini, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memikirkan kembali teknik pembangunan yang tepat yang akan digunakan oleh negara ini. sehingga komunitas yang direlokasi, terkurung, dan terpinggirkan tidak ada lagi.

Kebanyakan orang menganggap "pembangunan" adalah sebuah istilah yang netral,

yang berarti bahwa pembangunan dapat merujuk pada tindakan-tindakan yang diambil antara lain untuk meningkatkan infrastruktur masyarakat, aspek kehidupan politik, ekonomi, dan budaya. Menurut penafsiran ini, istilah “pembangunan” identik dengan “perubahan sosial”. Pendukung interpretasi ini berpendapat bahwa karena gagasan kemajuan bersifat otonom, maka diperlukan penjelasan tambahan, seperti pembangunan berdasarkan model kapitalisme, sosialisme, atau Indonesia, dan lain-lain. Teori pembangunan adalah teori sosio-ekonomi yang cukup luas dalam hal ini. Sudut pandang inilah yang mendominasi hampir semua diskusi mengenai transformasi sosial.

Salah satu taktik untuk mencapai tujuan yang dicari negara ini adalah pertumbuhan ekonomi. Karena perekonomian mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, maka perekonomian merupakan salah satu bidang yang mempunyai kepentingan strategis. Sektor perekonomian ini senantiasa ingin diperkuat melalui berbagai program pembangunan. Tercapainya tujuan perekonomian adalah cara yang baik untuk mengukur seberapa baik suatu negara berkembang. Metrik yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita penduduk, pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran.

Ketika pertumbuhan ekonomi dilaksanakan, masyarakat harus disadarkan akan keunikannya dan mayoritas lapangan kerjanya agar bisa bangkit. Kegiatan padat modal yang merugikan masyarakat mendapat prioritas dalam model industrialisasi (kapitalis) yang selama ini digunakan. Sehingga kegiatan perekonomian yang dilakukan tidak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat.

Adanya beberapa permasalahan mendasar dalam perekonomian yang tidak dapat diselesaikan secara instan, seperti permasalahan struktural rantai pasokan di sisi pasokan dan pertumbuhan UMKM, menggarisbawahi perlunya koordinasi kebijakan. Untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas produksi serta berbagai kegiatan perekonomian, Bank Indonesia dan pemerintah akan melakukan koordinasi kebijakan yang fokus mendukung pembangunan kelembagaan perekonomian. Selain mengoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk stabilisasi makroekonomi, tindakan koordinasi tertentu juga dilakukan untuk memperkuat sektor keuangan lokal, mendorong intermediasi perbankan, dan meningkatkan hubungan antara investor internasional dan otoritas Indonesia. Cabang-cabang Bank Indonesia di berbagai daerah secara konsisten melakukan kajian terhadap sektor ekonomi dan komoditas utama dengan menggunakan temuan survei dan Kajian Ekonomi Regional (KER).

Seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan pengusaha, berupaya mencapai kesejahteraan bersama melalui berbagai inisiatif. Meskipun demikian, mencapai tujuan kesejahteraan ini pada praktiknya tidaklah mudah. Proses pembangunan yang merupakan salah satu cara untuk memperoleh kemakmuran, dihadapkan pada beberapa tantangan. Pada akhirnya, beberapa orang mendapat manfaat dari kemajuan, sementara yang lain tidak.

Pasti akan terjadi disparitas antar pelaku ekonomi dan perbedaan ekonomi dalam kehidupan, akibat sunnatullah. Keadaan inilah yang pasti akan mengarah pada terciptanya mekanisme ekonomi, yang jika berlebihan akan membantu mengurangi kesenjangan meskipun kesenjangan tersebut tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Kebutuhan manusia hanya dapat dipenuhi melalui gotong royong dan kemurahan hati, karena masyarakat kaya membutuhkan masyarakat miskin dan masyarakat miskin membutuhkan masyarakat kaya. Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, berupaya mencapai tujuan pembangunan seperti kemakmuran, kemajuan, dan pembangunan ekonomi. Kondisi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini dilanda beberapa kemunduran. Dari sudut pandang intelektual, nampaknya proses pertumbuhan sebagian besar menganut ideologi kapitalisme. Akibatnya, negara-negara ini mulai berhati-hati dalam menerapkan sepenuhnya konsep-konsep yang dihasilkan dari sistem kapitalis ini.

Sistem ekonomi alternatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran syariah Islam telah berkembang di tengah kegagalan kemajuan yang didasarkan pada sistem kapitalisme global. Lembaga-lembaga ekonomi di negara-negara terbelakang yang menggunakan proses syariah terbukti mampu bertahan dalam krisis keuangan global dan, dalam beberapa situasi, bahkan mampu berkembang dan berkembang.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam relatif segar dalam bidang pemikiran ekonomi. Sekalipun ajaran Islam benar-benar memberikan arahan dalam urusan ekonomi, namun proses pendiriannya tetap diperlukan untuk tumbuhnya ilmu pengetahuan. Bahkan mencakup bidang ilmu ekonomi yang kemudian juga menjadi alternatif dan menjadi salah satu komponen ekonomi Islam. Kebangkitan ekonomi Islam juga telah memunculkan permasalahan-permasalahan jangka panjang yang disebabkan oleh penyebaran gagasan kapitalisme yang gagal. Namun prinsip-prinsip syariah Islam memang menuntut orang-orang yang menganutnya untuk berperilaku profesional, menunjukkan kerapian, kejujuran, ketertiban, dan keteraturan dalam prosesnya.

Selain permasalahan pembangunan yang belum memberikan hasil terbaik seperti yang

diuraikan sebelumnya, pertanyaan tentang bagaimana ekonomi Islam menawarkan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dijawab. Oleh karena itu penulis berencana untuk menyelidiki sudut pandang ekonomi Islam terhadap pembangunan. Literatur ini dimaksudkan agar dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan, pengangguran, dan kemiskinan.

## **EKONOMI PEMBANGUNAN**

Subbidang ekonomi terapan adalah ekonomi pembangunan. Bidang ekonomi ini muncul dua abad setelah ilmu ekonomi sebagai suatu bidang, yaitu pada tahun 1776 M, atau setelah Perang Dunia II. Informasi ini diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara-negara merdeka saat ini. Negara-negara ini sebagian besar adalah negara-negara berkembang yang berjuang dengan permasalahan kemiskinan, buta huruf, pengangguran, dan keterbelakangan umum di berbagai aspek masyarakat. Oleh karena itu, mereka ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat, tepat, dan tuntas.

Analisis ekonomi pembangunan dapat dicirikan sebagai subbidang ilmu ekonomi berdasarkan dua ciri mendasar ini Laporan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mengidentifikasi solusi bagi negara-negara tersebut untuk mempercepat pembangunan ekonomi mereka.

Berdasarkan konteks ini, para ahli menjelaskan keterbatasan atau pemahaman ekonomi pembangunan. Tujuan dari ekonomi pembangunan adalah untuk memecahkan tiga masalah mendasar yaitu kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan guna meningkatkan standar hidup masyarakat yang tinggal di negara-negara berkembang.

Pembangunan di negara-negara berkembang telah menyebabkan munculnya banyak pola, pendekatan, atau model dalam penerapannya. Perbedaan ini telah berkembang menjadi paradigma atau pandangan dunia universal dalam menjalankan pertumbuhan. Di negara berkembang, beberapa model pembangunan yang digunakan adalah:

### **Paradigma dengan Pertumbuhan Maksimal (*Maximal Growth Paradigm*)**

Paradigma ini berorientasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Paradigma ini bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan investasi dan teknologi. Produk nasional bruto adalah metrik yang digunakan untuk merencanakan atau menghitung

pertumbuhan (GNP). Pada saat yang sama, gagasan bahwa kesetaraan akan mengikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi dikenal dengan istilah trickle-down effect.

Teori trickle-down yang diantisipasi oleh negara-negara yang menerapkan paradigma ini tidak terwujud. Kenyataannya, paradigma ini membuat kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar. Dengan kata lain, meskipun paradigma ini dapat mengoptimalkan pembangunan ekonomi, namun kesetaraan tidak dapat dicapai. Sebenarnya hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan kelompok selain untuk mendongkrak produksi.

### **Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan (*Distribution with Growth Paradigm*)**

Paradigma ini muncul sebagai jawaban atas kegagalan paradigma pertama dengan memasukkan kesetaraan ke dalamnya, sehingga menghilangkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, juga telah mengadopsi paradigma ini dengan menggunakan investasi, teknologi, dan tindakan yang sama. Paradigma ini disebut sebagai “delapan jalur pemerataan” di bawah pemerintahan Orde Baru.

Pada kenyataannya, paradigma ini juga tidak mampu mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertumbuhan negara-negara miskin. Strategi makro dan kesiapan sumber daya manusia yang kurang tepat sasaran (masyarakat miskin) diduga menjadi penyebabnya. Salah satu penyebab utama bocornya dana pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil atau miskin adalah budaya korupsi. Namun, mereka yang berada dalam kemiskinan juga tidak siap untuk mengubah pola pikir mereka, sehingga bantuan apa pun pada akhirnya akan habis dan tidak akan mengubah keadaan mereka. Oleh karena itu, strategi makro yang berupaya meningkatkan perekonomian usaha kecil tanpa terlebih dahulu mengembangkan sumber daya manusia juga akan gagal.

### **Paradigma dengan Pendekatan Kebutuhan Pokok (*Basic Needs Approach*)**

Paradigma kebutuhan dasar merupakan upaya untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan dalam kelompok sosial. Paradigma ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar semua kelompok sasaran, termasuk pangan, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara efektif melalui uang yang disalurkan pemerintah.

Pemerintah berhenti membantu individu memenuhi kebutuhan mendasar mereka ketika pendanaan terbatas. Oleh karena itu, masyarakat sekali lagi tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Paradigma ini dan paradigma sebelumnya pada akhirnya runtuh. Hal ini

terjadi karena masyarakat miskin tidak mempunyai pilihan lain selain bergantung pada bantuan pemerintah untuk mengubah keadaan mereka.

### **Paradigma dengan Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Development Paradigm*)**

Para ekonom pembangunan, pakar kependudukan, dan pakar sumber daya manusia menciptakan pembangunan yang berpusat pada pengembangan sumber daya manusia setelah belajar dari paradigma pembangunan sebelumnya yang gagal. Menurut paradigma ini, pertumbuhan harus difokuskan pada melihat masyarakat sebagai subjek dan objek. Dualitas antara manusia sebagai agen pertumbuhan dan manusia sebagai objek yang harus ditingkatkan kesejahteraannya dihilangkan dengan paradigma ini.

Kemanusiaan secara keseluruhan dan keseluruhannya dikembangkan oleh pandangan dunia ini. Sebab, sumber daya manusia dikembangkan berdasarkan tuntutan psikis (sikap mental) dan tuntutan fisik (materi). Dengan demikian, efektivitas pembangunan ditentukan oleh sumber daya manusianya. Awalnya, perencanaan, mengawasi dan menilai hasil pembangunan, khususnya: jumlah penduduk, sebaran umur, komposisi, sebaran kekayaan, tingkat pendidikan, mobilitas, prospek kerja, dan permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

### **Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Paradigm*)**

Ketika Club of Rome mengangkat isu hambatan pertumbuhan pada tahun 1970, muncullah paradigma ini (*The Limit of Growth*). Berdasarkan analisis ini, tingkat kemajuan yang diproyeksikan saat ini akan berakhir dalam waktu kurang dari satu abad. Hal ini disebabkan oleh semakin menipisnya sumber daya alam yang ada saat ini.

Argumen politik di atas diperkuat dengan jawaban atas persoalan ini. Jelaslah bahwa penerapan kekuatan pasar bebas yang tidak terkendali, jika mereka terus mengikuti arah kapitalisme konvensional, pada akhirnya akan mengakibatkan kebuntuan ekologis. Oleh karena itu, setelah mendapatkan dorongan awal, pertumbuhan negara-negara miskin harus mencari cara untuk mengurangi biaya material dan produksi ke tingkat yang belum pernah terjadi di negara-negara Barat. Negara-negara lain tidak dapat meniru praktik pemborosan sumber daya yang diasosiasikan dengan gaya hidup Barat, seperti penggunaan televisi, mesin cuci, dan peralatan rumah tangga lainnya.

Meskipun konsep-konsep dalam paradigma ini bersifat teoretis, namun konsep-konsep tersebut berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Umat manusia harus mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan ekosistem jika ingin hidup sejahtera. Pandangan dunia ini mengungkapkan harapan bahwa penggunaan sumber daya bumi yang berlebihan oleh manusia tidak akan menjadi satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap kehancuran bumi di masa depan. Pengertian keberlanjutan merupakan sintesis unsur-unsur ekonomi, fisik, sosial, dan politik, jika efisiensi adalah istilah ekonomi dan keadilan ekonomi adalah konsep ekonomi yang didasarkan pada etika. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memberikan manfaat secara adil dan merata kepada seluruh anggota masyarakat, termasuk generasi mendatang.

### **Paradigma dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (*General Public Participation Paradigm*)**

Kritik terhadap pembangunan yang direncanakan secara terpusat (*central Planning*) memunculkan paradigma ini. Paradigma ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek. Dalam pembangunan, masyarakat dapat memainkan peran besar berdasarkan kebutuhannya. Keterlibatan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sosial merupakan contoh keterlibatan masyarakat.

Pembangunan sebenarnya sedang menuju ke arah proses degradasi yang lebih dalam jika tidak dikritik. Memberikan kesempatan terpenuhinya kepentingan semua kelompok adalah satu-satunya cara agar hal tersebut tetap berjalan. Oleh karena itu, proyek-proyek pembangunan di masa depan harus mempertimbangkan tumbuhnya kesadaran politik masyarakat umum, yang menunjukkan perlawanan terhadap ideologi pembangunan. Kebutuhan akan pemberdayaan dalam pembangunan semakin mendesak, sehingga keberlanjutan pembangunan terancam jika hal ini diabaikan.

### **Paradigma Pembangunan Mandiri (*Self Reliant Paradigm*)**

Paradigma ini menyimpang dari upaya menghilangkan ketergantungan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Alih-alih mengimpor atau mengadopsi teknologi dari tempat lain, paradigma ini justru menghasilkan teknologinya sendiri. India pada masa Mahatmagandhi, Tiongkok pada masa Maozedong, Tanzania pada masa Julius Nyerere, dan India pada masa Bung Karno—yang terkenal dengan ungkapan “berdiri di atas kaki sendiri”—termasuk negara-negara yang menerapkan paradigma ini. Namun pada kenyataannya, paradigma ini juga belum mampu mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Pada kenyataannya, pandangan dunia ini bertentangan dengan keadaan di negara-negara berkembang.

Menolak pengaruh kapitalis Barat, Indonesia mulai bergeser ke kiri dan mengambil ide-ide dari RRT dan Uni Soviet, memerlukan revolusi untuk melepaskan diri secara total dari cengkaman pengaruh Barat, khususnya imperialisme modern berupa dominasi perdagangan dan berkembangnya ketergantungan, yang membuat banyak negara berkembang bergantung pada negara-negara kaya dalam hubungan yang tidak timbal balik. Alhasil, Sukarno mengumumkan gaung revolusi Indonesia dengan lantang dan menyatakan dirinya sebagai panglima revolusi. Kemudian gagasan-gagasan berikut mulai terbentuk: gagasan konfrontasi diterapkan dalam bidang kebijakan luar negeri untuk mendorong dinamisme masyarakat, dan gagasan kemandirian atau mampu berdiri sendiri dibentuk di lapangan. bidang ekonomi.

### **Paradigma Syari'ah (*Syari'ah Paradigm*)**

Paradigma ini berkembang seiring dengan keinginan umat Islam untuk mencoba menerapkan prinsip-prinsip syariah di sektor bisnis. Menurut pandangan dunia ini, kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika seluruh upaya manusia berpedoman pada syariah, atau aturan Tuhan. Paradigma ini menawarkan pemahaman yang sempurna tentang alam semesta, yaitu: langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia sebagai khalifah, meski tidak semua orang sepakat akan kegunaannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan alam.

## **EKONOMI ISLAM**

Manusia melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan mazhab ekonomi sebelumnya, aktivitas ekonomi Islam dipandang berbeda sebagai mazhab ekonomi tersendiri. Berikut adalah beberapa sudut pandang berbeda tentang apa arti ekonomi Islam:

1. Islam yang merupakan perwujudan kerangka Islam dalam penataan kehidupan ekonomi berkenaan dengan pokok bahasan madzab ini, yaitu kebenaran penalaran berdasarkan prinsip-prinsip moral Islam dan prinsip-prinsip ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berkaitan dengan suatu permasalahan. kekhawatiran yang berkaitan dengan strategi ekonomi dan narasi sejarah manusia.
2. Ekonomi Islam adalah suatu struktur ekonomi yang didasarkan pada seperangkat prinsip ekonomi luas yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta disesuaikan sepanjang masa dan sejalan dengan lingkungan.

3. Ilmu ekonomi Islam membimbing dan mengendalikan kegiatan perekonomian sesuai dengan prinsip dan taktik ekonomi Islam

Konsep ini menawarkan perubahan yang signifikan dari aliran ekonomi sebelumnya. Ciri-ciri dan prinsip dasarnya:

- a. Salah satu komponen sistem Islam secara keseluruhan adalah ekonomi Islam. Islam memenuhi kehidupan hewannya secara multidimensi, multifaktorial, dan multilengkap. Kehidupan ekonomi termasuk di dalamnya. Prinsip-prinsip Islam pada dasarnya berbeda dengan prinsip-prinsip agama lain. Islam adalah agama hukum, perundang-undangan, kesopanan, dan perilaku. Akibatnya, sangatlah tidak adil jika kita membagi seluruh pedoman hidup ini ke dalam beberapa bagian. Dalam Islam, bisnis dilakukan karena pengabdian. Baik melibatkan kerja ekonomi atau tidak, semua pekerjaan yang dilakukan umat Islam berpotensi untuk diubah dari kerja material yang bersifat duniawi menjadi pemenuhan ibadah jika tujuan umat Islam adalah mencari keridhaan Allah SWT.
  - b. Upaya ekonomi Islam sungguh terhormat. Kedua aliran ekonomi ini mempunyai materialisme sebagai prinsip panduannya. Oleh karena itu, mereka terlibat konflik dalam upaya menguasai pasar dan sumber bahan baku serta bersaing. Persaingan ini mengakibatkan pecahnya perang dunia pertama dan kedua, serta potensi terjadinya perang dunia ketiga atau konflik nuklir antara blok kapitalis dan sosialis. Sekolah ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi kolaborasi dan pembagian keuntungan dalam seluruh aspek operasional bisnisnya, sehingga menumbuhkan semangat altruistik yaitu gotong royong.
  - c. Dalam Islam, pengawasan riil memegang tempat sentral dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi. Lemahnya pengawasan yang hanya bergantung pada kontrol pemerintah menjadi penyebab terjadinya penyelewengan operasi ekonomi oleh sebagian pelaku ekonomi. Pengawasan hati nurani yang dilandasi keimanan kepada Allah SWT dan penentuan waktu akhir zaman sudah mendarah daging dalam sistem ekonomi Islam. Sekalipun seorang muslim dapat lolos dari pengawasan otoritas manusia, namun ia akan merasa tidak berdaya terhadap Allah SWT. Jenis pengawasan ini menghilangkan anomali dalam kegiatan ekonomi dan menjamin keselamatan perilaku masyarakat.
2. Ekonomi Islam mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu. Tujuan luhur ekonomi Islam adalah untuk memenuhi perannya sebagai kekhalifahan global yang bertugas meningkatkan kesejahteraan. Seorang muslim beranggapan bahwa dihadapan Allah SWT, dialah yang akan mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Keuntungan materi dari usaha ekonomi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan ketaatan kepada Allah SWT yang merupakan tujuan manusia bagi umat Islam. Dengan kata lain, tidak seperti sistem ekonomi ciptaan manusia, tujuan ekonomi Islam tidak melibatkan monopoli, menciptakan persaingan, atau mendorong keserakahan dengan menimbun seluruh kekayaan dunia dan menyembunyikannya dari orang lain. Ekonomi Islam bertujuan untuk menerapkan hak-hak khilafah dan memenuhi arahan Allah SWT dengan mencapai kekayaan, kemakmuran, dan kemaslahatan hidup bagi seluruh masyarakat. Penjelasan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam di atas menunjukkan perpaduan antara aspek individu dan masyarakat, faktor duniawi dan akhirat, serta unsur material dan spiritual. Keserasian komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi kemampuan individu dan masyarakat dalam mencapai tujuannya.

## **PEMBANGUNAN BERBASIS EKONOMI ISLAM**

Menurut ilmu ekonomi Islam, upaya pembangunan suatu bangsa harus mempunyai tujuan yang tinggi, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesenangan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Pembangunan perlu dikaitkan dengan sesuatu yang lebih kekal (transendental), selain dikaitkan dengan isu-isu global. Oleh karena itu, baik berupa firman Allah, sabda Nabi, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama faqih, pembangunan harus mengacu atau berpijak pada ketentuan syariah.

Pembangunan manusia secara keseluruhan telah muncul sebagai tujuan utama ekonomi Islam. Dengan kata lain, pertumbuhan tidak hanya memperkuat perekonomian masyarakat tetapi juga mentalitas mereka. Perkembangan adalah suatu keharusan secara rohani dan juga jasmani. Agar setiap orang dapat bertumbuh secara pribadi, memajukan negara, dan memajukan umat manusia, maka kebangkitan kebutuhan spiritual secara inheren akan mendorong kemandirian dan kesadaran yang tinggi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, mewujudkan negara dan umat manusia yang senantiasa mempertimbangkan kepentingan dunia dan akhirat difokuskan pada lima jenis akhlak. Tindakan bermanfaat ini meliputi perilaku tertib (Wajib): Masyarakat, sebagai sebuah negara, dan sebagai suatu spesies, harus menjalani kehidupannya dengan tertib, terutama dalam hal perekonomian. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan timbul akibat yang berdampak pada keberadaan mereka di akhirat.

## **SIMPULAN**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen manajemen, peraturan, perencanaan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Suatu organisasi akan sangat diuntungkan dengan memiliki sumber daya manusia yang unggul di samping membangun reputasi positif untuk menumbuhkan kepercayaan di masyarakat sehingga akan memudahkan proses penyerapan anggaran. Selain itu, pegawai akan lebih mudah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya jika persyaratan pemerintah jelas. Artinya, proses penyerapan anggaran akan ditingkatkan melalui undang-undang yang lebih transparan. Pada akhirnya, peningkatan penyerapan anggaran akan dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang baik dan komitmen manajemen yang kuat.

Ada banyak batasan dalam penelitian ini. Pertama, karena studi ini terbatas pada satu dinas saja, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, maka temuannya mungkin tidak dapat diterapkan pada lembaga lain yang sudah ada saat ini. Kedua, masih terdapat ketidakpastian apakah responden yang dituju benar-benar mengisi kuesioner dengan benar karena data yang digunakan hanyalah data primer yang diperoleh melalui survei. Pemerintah daerah, khususnya Departemen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran mereka dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, menambah jumlah staf, dan merekrut personel berdasarkan bidang keahlian mereka, berkat implikasi bermanfaat yang ditawarkan oleh penelitian ini.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk tidak selalu memperbarui peraturan, karena hal ini akan menghambat kemampuan pegawai negeri dalam menyelesaikan rencana kerjanya dan memperlambat proses penyerapan anggaran. Pertahankan tingkat komitmen manajemen yang konstan dengan melacak dan menilai sasaran kinerja staf dan secara konsisten mendorong pelatihan teknis bagi pekerja publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. Arif, E. (2012). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011, 19(2), 41–62. Birohukum.pu.go.id. (n.d.). produk hukum kementerian pekerjaan umum dan penataan ruang.
- Cooper, D. (2015). Exploratory Analyses of the Effects of Managerial Support and Feedback Consequences on Behavioral Safety Maintenance, (November). <https://doi.org/10.1300/J075v26n03>
- Donaldson, L., Davis, J. H., Argyris, C., Chandler, A., Etzioni, A., Hage, J., ... Whetten, D. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder

Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64.

- Dwiyana, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Monitoring Dan Evaluasi Sebagai Variabel Moderating. Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/634>
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Multivariate dengan program SPSS (tujuh). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2013). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. (Salemba empat, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2016). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah. (Salemba empat, Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Herriyanto, H. (2012a). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketelambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Universitas Indonesia.
- Herriyanto, H. (2012b). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada SKL di Wilayah Jakarta. universitas indonesia